

Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Tanjung Selor)

M. Fachrizal Abubakar

Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara
Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda

Abstract: *The research examines the Education Policy Implementation Guide Level Elementary And Secondary Education in Bulungan North Kalimantan (Case Study In SMA Negeri 1 Tanjung Selor). The result showed the overall picture that the Free Education Policy Implementation Level Elementary And Secondary Education in Bulungan North Kalimantan (Case Study In SMA Negeri 1 Tanjung Selor) has been used in accordance with the provisions and target groups BOSDA in SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Although in terms of the amount received is not in accordance with the provisions, but the school felt greatly helped by BOSDA. Factors inhibiting the implementation of the Regional Regulation No. 13 Year 2014 concerning the implementation of the program of free education in primary and secondary education in Bulungan, complexity in the preparation of an accountability report that is due to the short period of preparation of accountability reports.*

Keywords: *“Implementation, Policy, Free Education”*

Abstrak: *Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Tanjung Selor). Dari hasil penelitian diperoleh Gambaran secara keseluruhan bahwa Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Tanjung Selor) telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan kelompok sasaran BOSDA di SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Walaupun dari sisi jumlah yang diterima belum sesuai dengan ketentuan, namun pihak sekolah merasakan sangat terbantu dengan BOSDA. Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang program penyelenggaraan pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Bulungan, Kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana yaitu dikarenakan singkatnya jangka waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban.*

Kata Kunci : *“Implementasi, Kebijakan, Pendidikan Gratis”*

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam merumuskan program/kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama melaksanakan program/kebijakan yang telah diputuskan, yang didukung oleh sarana dan prasarana yang ada.

Pendidikan memiliki peranan strategis menyiapkan generasi berkualitas untuk kepentingan masa depan. Bagi setiap orang tua, masyarakat dan bangsa, pemenuhan akan pendidikan menjadi kebutuhan pokok. Pendidikan dijadikan bagian utama dalam upaya pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan suatu bangsa. Pada dasarnya pendidikan seperti eksperimen yang tidak pernah selesai sampai kehidupan manusia ini berakhir. Dikatakan demikian, karena pendidikan merupakan bagian dari peradaban manusia yang yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan potensi alami

manusia yang selalu ingin menghadirkan penemuan-penemuan terbaru yang kreatif dan inovatif dalam segala bidang kehidupan

Kebijakan pendidikan gratis yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Bulungan ini bertujuan untuk menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah untuk membantu meringankan biaya sekolah dan untuk meningkatkan manajemen pendidikan dalam rangka mewujudkan standar biaya pendidikan yang berbanding lurus dengan kualitas pendidikan. Dengan demikian, kualitas pendidikan akan meningkat guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu menciptakan sumber daya yang berkualitas. Sasaran kebijakan pendidikan gratis ini adalah Sekolah Dasar Negeri dengan jumlah sekolah 125 dan jumlah siswa 1.6625 siswa, Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan jumlah sekolah 42 dan jumlah siswa 5.167, Sekolah Menengah Atas Negeri serta Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dengan jumlah sekolah 8 dan jumlah siswa 2.274 di jajaran Pemerintah Kabupaten Bulungan. Dengan kata lain, semua sekolah negeri yang berada di Kabupaten Bulungan mendapatkan dana untuk biaya operasional sekolah, di Kabupaten Bulungan secara umum tahun 2013 persentase penduduk yang mengalami putus sekolah cenderung mengalami penurunan dibanding tahun 2012 masing-masing sebesar 1,09% untuk usia 7-12 tahun, 5,79% usia 13-15 tahun dan 38,04% untuk usia 16-18 tahun, sementara di tahun 2014 persentase penduduk yang mengalami putus sekolah cenderung mengalami penurunan dibanding tahun 2013 masing-masing sebesar 0% untuk usia 7-12 tahun, 5,92% untuk usia 13-15 tahun dan 23,20% untuk usia 16-18 tahun.

Sedangkan mengenai angka buta huruf di Kabupaten Bulungan hanya pada kisaran umur 10 tahun +6,34% dan 15 tahun +7,09% oleh karena itu pemerintah Kabupaten Bulungan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang program penyelenggaraan pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah. Agar masing-masing prioritas pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu didukung dengan arah kebijakan yang matang dan komprehensif. Hal itu harus didukung penuh dengan komitmen peningkatan anggaran pendidikan secara bertahap guna memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menurut salah satu pemerhati pendidikan di Kabupaten Bulungan beliau mengatakan bahwa pendidikan gratis di Kabupaten Bulungan khususnya di Tanjung Selor, tidaklah jauh berbeda dengan kota-kota besar lainnya seperti Samarinda, Kutai Kartanegara, Bontang dan Balikpapan. Untuk pendidikan di Kabupaten Bulungan sudah cukup baik kurikulum yang diajarkan sudah berstandar nasional untuk semua tingkatan pendidikan, oleh karena itu pendidikan sangatlah penting saat ini jika tidak mengapa Pemerintah Kabupaten Bulungan mewajibkan program wajib 12 tahun belajar semua itu diharapkan agar pendidikan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat bukan hanya dirasakan oleh kaum yang dapat dikatakan berkecukupan secara ekonomi tetapi juga masyarakat yang ekonominya kurang mampu.

Program Pemerintah Kabupaten Bulungan yang mengarahkan pada kebijakan pendidikan gratis sebagai salah satu program andalan pembangunan Kabupaten

Bulungan yang memuat kebijakan rencana pembangunan untuk menjadi pedoman pembangunan daerah tersebut sesuai dengan visi Kabupaten Bulungan, “Mewujudkan Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Kabupaten Bulungan yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera.” Program Pendidikan gratis di Bulungan dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pendidikan gratis ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor. 13 tahun 2014 tentang program penyelenggaraan pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis memandang perlu mengkaji lebih lanjut berbagai masalah yang berkaitan dengan implementasi program penyelenggaraan di pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Bulungan.

Peraturan Daerah Mengenai Pendidikan Gratis: Bentuk Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan

Menurut Setiodarmodjo, (2000:36) kebijakan adalah suatu istilah yang menunjukkan adanya proses, karena hasil keputusan atau perbuatan yang mempunyai sifat untuk dilaksanakan kebijaksanaan, karena merupakan hasil perbuatan atau pemikiran seseorang, maka mengandung berbagai macam kegiatan dan keputusan lainnya yang berkaitan dengan terealisasinya tujuan kebijaksanaan itu. Sedangkan menurut Kartasasmita dalam Setiodarmodjo, (2000:36) menyatakan bahwa kebijakan dapat diartikan sebagai upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah (2) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut (3) apa yang menyebabkan atau mempengaruhinya. Kebijakan tidak hanya berhenti sebagai sebuah kebijakan tanpa dilaksanakan dalam konteks mengaplikasikan kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi suatu permasalahan

Budi Winarno (2002:32), mengatakan bahwa: implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya. Widodo (1994:21) dalam studi kebijakan negara, dikemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu studi yang bersifat “crucial”, pada studi administrasi negara dan kebijakan negara, dalam arti bagaimanapun baiknya implementasi, akan tetapi tidak didahului danya suatu rencana yang baik, maka akan didapat suatu hal yang kurang sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi kebijakan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik.

Pendidikan Gratis

Radja mudyaharjo (2002:1) mengatakan pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup.pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Pendidikan menurut Santoso S. Hamijoyo (2004: 3), adalah

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Menurut Hasibuan (2005) Proses atau langkah-langkah pendidikan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan sasaran, kurikulum, sarana, peserta dan pelatihan.

Menurut Wahyudi (2005:78) pendidikan gratis dan mudah bagi rakyat artinya pendidikan tersebut diselenggarakan untuk rakyat dan mudah diikuti atau dijangkau untuk semua rakyat". Sedangkan menurut D.R. Harsono (2007: 51), "Sekolah gratis adalah sekolah dimana anak-anak dan orang tua tidak harus membayar biaya yang dikelola oleh sekolah, misalnya uang SPP, uang pengembangan, uang pendaftaran, dan uang buku". Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan gratis adalah pendidikan dimana semua lapisan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu dapat melaksanakan kegiatan belajarnya dengan murah dan mudah yaitu mereka tidak harus membayar biaya-biaya yang dikelola oleh sekolah, misalnya uang SPP, uang pengembangan, uang pendaftaran, dan uang buku atau dapat dikatakan tanpa dipungut biaya.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah di Kabupaten Bulungan

Alokasi Dana Sekolah Ke Penerima Dana

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, untuk alokasi dana ke penerima dan jumlah yang harusnya diterima, pihak sekolah perlu menanyakan kepada pemerintah, baik pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, apakah dana yang telah dikucurkan berasal dari pihak yang mana, sehingga terjadi transparansi dana oleh pihak pemerintah. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA/SMK Negeri Rp 4.766.000.000 sedangkan untuk SMA/SMK Swasta Rp 607.000.000, sedangkan untuk alokasi dana yang diperuntukan untuk SMA melalui BOSPROF 1.000.000 setiap siswa, BOSNAS 1.200.0000. Sedangkan untuk alokasi dana yang ditujukan untuk SMK melalui BOSPROF dan BOSNAS 1.500.0000 per siswa. Hanya saja, hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk masalah ketepatan waktu pencairan dana selalu tidak tepat waktu atau terlambat. Menurut pihak berwenang keterlambatan pencairan dikarenakan proses administrasi ada di bagian keuangan baik provinsi maupun daerah, sehingga untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan hanya mengkorfimasikan saja. Koordinasi antara Dinas Pendidikan Bulungan dan bagian keuangan sudah cukup intens, namun demikian untuk pencairan sering kali memang karena kas daerah belum ada.

Penyaluran Dan Penggunaan Dana

Penyaluran dana program sekolah gratis pada mulanya dilakukan oleh tim manajemen provinsi, kabupaten dan kota dengan mengajukan surat penyediaan dana (SPD) ke biro/bagian keuangan sekretaris daerah sesuai ketentuan. Setelah SPD terbit, tim manajemen mengajukan surat permohonan pembayaran langsung (SPP-LS) dana sekolah gratis sesuai kebutuhan. Dinas pendidikan terkait melakukan verifikasi SPP-LS kemudian menerbitkan surat perintah membayar langsung (SPM-LS). Surat itu ditujukan kepada biro/bagian keuangan Setda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Biro/bagian keuangan Setda melakukan verifikasi SPM-LS. Kemudian menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada rekening kas daerah. Selanjutnya, dana sekolah gratis yang telah dicairkan dari biro/bagian keuangan Setda disalurkan ke sekolah/madrasah/ponpes yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten dan kota dan lembaga penyalur.

Pelayanan dan Penanganan Pengaduan

Pelayanan yang diberikan pihak dinas pendidikan kepada pihak sekolah dalam hal pengaduan pihak sekolah langsung mendatangi ke kantor dinas pendidikan untuk menyampaikan aspirasi yang menjadi kendala disekolah seperti halnya keterlambatan dalam penyaluran dana apalagi ditambah akses internet yang ada disekolah tidak ada hal itu menghambat sekolah dalam melakukan pengiriman data kepada dinas pendidikan. Pengaduan tersebut yang disampaikan pihak sekolah kepada dinas pendidikan diharapkan dapat segera menindaklanjuti pengaduan tersebut agar terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan SDM di Kabupaten Bulungan.

Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis

Pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas yang dibentuk oleh tim dinas pendidikan digunakan untuk mengawasi setiap kegiatan-kegiatan dan penggunaan dana yang dimiliki sekolah mengenai apa yang telah dilaksanakan maksudnya pengawasan tersebut untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas. Persoalannya tanpa pengawasan, proses pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas bisa saja menyimpang atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal ini banyak terjadi, terutama dalam hal keuangan. Kegiatan pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik catatan, dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar-standar yang berlaku.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pendidikan gratis telah ada tim pengawas sendiri melalui SK Bupati Bulungan, dibuatnya tim pengawasan ini digunakan untuk mengawasi semua tugas-tugas dan penggunaan dana yang dilakukan oleh sekolah agar tidak terjadi

kesalahan, baik kesalahan teknis ataupun kesalahan prosedural. Pengawasan yang dilakukan dalam setiap organisasi akan berbeda. Pengawasan dapat dilakukan secara internal yang dilakukan oleh kepala sekolah beserta warga sekolah lainnya dengan pihak penyelenggara sekolah. Di samping itu pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas fungsional, seperti pengawas sekolah, inspektorat wilayah/Badan Pengawas Daerah, BPIC, BPKP, dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, pengawasan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang pendidikan atau akuntan publik.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Kerumitan Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban sering sekali terdapat kekeliruan hal ini ditambah lagi dengan semakin singkatnya waktu penyusunan pertanggungjawabannya penyusunan sehingga membutuhkan pemikiran konsentrasi yang teliti apalagi ditambah dengan jangka waktu yang sangat singkat sehingga sangat mempersulit pihak sekolah dalam penyusunan laporan padahal laporan pertanggungjawaban tersebut harus didukung dengan data-data yang lengkap dan jelas sehingga masih banyak sekolah yang dalam penyusunan laporan banyak yang terlambat Berdasarkan uraian tersebut, maka kesulitan dalam laporan pertanggungjawaban merupakan kendala yang utama di dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. Kesulitan ini dapat dipengaruhi karena singkatnya jangka waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban BOSDA, kurangnya kejelasan tentang pertanggungjawaban pada saat sosialisasi dan penggunaan dana yang sangat dibatasi dengan aturan-aturan yang dalam pembuatan laporan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan batasan yang sudah diatur di dalam buku pedoman.

Keterlambatan Pencairan Dana

Keterlambatan pencairan dana yang diberikan kepada sekolah masih kurangnya kepastian tanggal atau waktu penyaluran dana tetapi masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu setiap tiga bulan sekali atau setiap triwulan sekali yang mengakibatkan proses pembelajaran sedikit terlambat karena belum adanya dana yang digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan dalam proses pembelajaran tersebut yang seharusnya awal periode atau awal triwulan dananya harus sudah cair sesuai dengan aturannya, terlambatnya pencairan dana tersebut mungkin disebabkan oleh pemerintah dalam membuat rencana APBN. Jadi sekolah harus berusaha meminjam untuk membiayai semua kegiatan yang sudah berlangsung terlebih dahulu Berdasarkan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa keterlambatan dalam pencairan dana mungkin disebabkan dengan adanya pembuatan RAPBN oleh pemerintah yang di buat pada awal tahun. Oleh sebab itu, maka pihak sekolah harus pandai-pandai berfikir bagaimana yang harus dilakukan agar semua kegiatannya bisa berjalan dengan lancar yaitu salah satunya harus mencari dana talangan terlebih dahulu, padahal pada kenyataannya kadang dana yang dipinjam itu lebih besar dari pada dana yang keluar dari pemerintah.

Kesimpulan

1. Alokasi dana sekolah ke penerima dana yang diberikan dinas pendidikan kepada sekolah telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan kelompok sasaran BOSDA di SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Walaupun dari sisi jumlah yang diterima belum sesuai dengan ketentuan, namun pihak sekolah merasakan sangat terbantu dengan BOSDA karena selama ini selalu mengandalkan dana rutin yang jumlahnya terbatas, sehingga tidak dapat mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada.
2. Penyaluran dana penggunaan dana, yang diberikan Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah masih belum tepat tanggal atau waktu penyaluran dana, tetapi masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu setiap tiga bulan sekali atau setiap triwulan sekali yang mengakibatkan proses pembelajaran sedikit terlambat karena belum adanya dana yang digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan dalam proses pembelajaran tersebut.
3. Pelayanan dan penanganan pengaduan, yang diberikan dinas pendidikan selalu menyiapkan waktu kepada setiap sekolah untuk menyampaikan keluhan-keluhannya atau aspirasi yang ingin disampaikan kepada Dinas Pendidikan, karena dengan adanya aspirasi dalam penyelenggaraan pendidikan gratis baik itu mengenai penyaluran dana atau keterlambatan dana maka diharapkan dinas pendidikan dapat mengoptimalkan dalam penyelenggaraan pendidikan gratis.
4. Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang program penyelenggaraan pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Bulungan yaitu:
 - a. Kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana yaitu dikarenakan singkatnya jangka waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban BOSDA, kurangnya kejelasan tentang pertanggungjawaban pada saat sosialisasi dan penggunaan dana yang sangat dibatasi dengan aturan-aturan yang dalam pembuatan laporan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan batasan yang sudah diatur di dalam buku pedoman.
 - b. Keterlambatan pencairan dana yaitu kurangnya kepastian tanggal atau waktu penyaluran dana tetapi masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu setiap tiga bulan sekali atau setiap triwulan sekali yang mengakibatkan proses pembelajaran sedikit terlambat karena belum adanya dana yang digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan operasional dalam proses pembelajaran tersebut.

Saran

1. Pemerintah agar dapat memprioritaskan dana untuk BOSDA dalam APBD karena selama ini dana yang diberikan sangat terbatas sehingga sangat menghambat rencana penyelenggaraan kegiatan yang ada di sekolah oleh sebab itu hendaknya pemerintah memberikan tambahan dana yang ditujukan khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler agar kegiatannya itu dapat berlangsung secara optimal.

2. Pemerintah sebaiknya dalam hal penyaluran penggunaan dana yang diberikan kepada pihak sekolah per triwulan agar dapat tepat waktu supaya proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar sehingga sekolah tidak perlu lagi meminjam kepada pihak ke tiga untuk membiayai semua kegiatan yang sudah berlangsung terlebih dahulu
3. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan tambahan kepada para pelaksana agar pemahaman terhadap prosedur dan mekanisme kerja BOSDA dapat ditingkatkan karena dalam hal mekanisme/prosedur Program BOSDA masih dirasakan panjang, sehingga perlu untuk disederhanakan.
4. Pengawasan terhadap implementasi pendidikan gratis perlu ditingkatkan oleh pihak terkait agar implementasi kebijakan pendidikan gratis lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif.
5. Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang program penyelenggaraan pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Bulungan yaitu:
 - a. Pihak pemerintah agar dapat lebih serius lagi dalam memberikan pengarahannya tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban agar benar dan sesuai dengan buku panduannya.
 - b. Pemerintah agar lebih cepat dalam penyusunan anggaran sehingga pencairan dana dapat datang tepat waktu supaya pihak sekolah tidak perlu harus mencari dana talangan dulu untuk membiayai keperluan yang sudah berlangsung.

Daftar Pustaka

- Hamijoyo, Santoso S. 2004. *Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harsono, D. R. 2007. *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasibuan. 2005. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mudyaharjo, Radja. 2002. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan: Dengan Ilustrasi Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Setiodarmodjo. 2000. *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2000. *Prinsip – prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widodo. 1994. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Proses Penetapan Kebijaksanaan*. Jakarta: Erlangga.
- Wahyudi. 2005. *Analisis Perumusan dan Saran Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.